

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat memiliki peranan penting, khususnya masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan (Jabaruddin et al., 2023; Saraswati & Dharmawan, 2014). Adanya kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan (Utami, 2015), serta mendorong kelestarian hutan (Damayatanti, 2011; Jabaruddin et al., 2023; Kurniawan, 2011; Rahman et al., 2024; Saraswati & Dharmawan, 2014; Utami, 2015). Sehingga, pengelolaan hutan di Indonesia membalikkan paradigma manajemen hutan dari pendekatan yang bersifat terpusat dari atas (*top down*) menjadi lebih *bottom up* dengan pendekatan berbasis masyarakat setempat, dalam hal ini Perhutanan Sosial (Pambudi, 2023).

Perhutanan sosial memungkinkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan secara lestari (berkelanjutan) (Gunawan et al., 2022; Njurumana et al., 2025). Salah satunya adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Putra Manglayang yang menerapkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) kemitraan dengan Perhutani (Hapsari et al., 2014). PHBM ini merupakan bagian dari paradigma CBFM (*Community Based Forest Management*) dimana pengelolaan hutan tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan atau pemerintah namun harus berguna bagi masyarakat (Ardyanny et al., 2020; Damayatanti, 2011).

Namun, dalam praktiknya pengelolaan hutan berbasis masyarakat berpotensi menghadapi tantangan dan kekawatiran (Cantarello et al., 2024; Pambudi, 2023). Misalnya kebakaran hutan (Cheney et al., 2024; Wen et al., 2024), perubahan iklim (Nur et al., 2023), pandemi (Njurumana et al., 2025; Sanudin et al., 2023), ataupun perubahan kebijakan (Purnomo et al., 2020; Reyes et al., 2024; Rif'an, 2020; Tantoh & McKay, 2021). Gangguan ini menciptakan ketidakpastian yang meningkat atas kemampuan hutan untuk memenuhi peran pentingnya di masa depan (Cantarello et al., 2024). Tantangan yang sering terjadi pada KTH Putra Manglayang seperti fluktuatif harga pasar, dan ketersediaan tenaga kerja dalam mengelola hutan karena mayoritas anggota KTH memiliki usia lanjut. Lebih lanjut, pelaksanaan perhutanan sosial selama ini dinilai masih belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dalam kebijakan maupun proses implementasinya. Ketidakjelasan regulasi, perubahan kebijakan yang sering terjadi, dan prosedur birokrasi yang rumit dapat memperlambat implementasi perhutanan sosial (Pambudi, 2023).

Meningkatkan resiliensi masyarakat merupakan dasar untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menahan guncangan (Ayu et al., 2018; Folke, 2006a; Nur et al., 2023; Parera et al., 2024; Sanudin et al., 2023), karena masyarakat merupakan unit dasar dari struktur sosial yang berada di garis depan untuk respon terhadap tantangan (Ayu et al., 2018; Kartika Sari, 2022; Njurumana et al., 2025; Pambudi, 2023; Parera et al., 2024). Sehingga, resiliensi menjadi salah satu kunci agar masyarakat hutan dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut (Folke, 2006a; Holling, 1973). Dalam penelitian ini, resiliensi yang dimaksud adalah kemampuan KTH bertahan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat terhadap

perubahan dengan memanfaatkan sumber dayanya serta mempertahankan fungsi dan strukturnya dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Perhutanan sosial merupakan salah satu contoh penerapan *Nature-Based Solutions* (NBS) yang mengacu pada pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan sosial-lingkungan (Mccarton & O'hogain, 2024; Standish & Parkhurst, 2024; Suratno et al., 2022). Sejalan dengan itu, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dipahami sebagai bentuk keseimbangan sosial, ekonomi, sosial dan lingkungan (Ayu et al., 2018; Jabaruddin et al., 2023; Leslie et al., 2015; Nur et al., 2023; Parera et al., 2024; Reyes et al., 2024; Saraswati & Dharmawan, 2014) serta tatakelola (Folke, 2006; Purnomo et al., 2020; Tantoh & McKay, 2021). Sehingga, resiliensi mengacu pada kapasitas relasional yang mempertahankan hubungan antara dimensi-dimensi tersebut. Selain itu, dengan kapasitas resiliensi yang rendah, masyarakat tidak ingin lagi terlibat dalam pengelolaan hutan, karena keraguan tentang masa depan (Cheney et al., 2024).

Menurut Nikinmaa et al., (2020) konsep resiliensi sosial-ekologis yang lebih holistik belum diterapkan secara luas dalam praktik pengelolaan hutan karena kurangnya kejelasan dalam mengoperasionalkannya, terutama dalam konteks perubahan struktural antara masyarakat dengan hutan. Sedangkan, dalam konteks pembangunan resiliensi sudah banyak diteliti dalam berbagai disiplin ilmu (Nguyen, 2020), misalnya keanekaragaman hayati (Shumi et al., 2024), ekologi-*landscape* (Chambers et al., 2019; Fischer, 2018), pariwisata (Holladay & Powell, 2013a), wisata alam (P. Nugroho et al., 2022), kesehatan masyarakat (Pfefferbaum et al., 2016), pesisir (Lloyd et al., 2013), dan dalam studi bencana resiliensi telah digunakan untuk mengeksplorasi ketahanan dan pemulihan masyarakat dari angin topan, banjir, dan kejadian ekstrem lainnya (Cinner & Barnes, 2019).

Meskipun demikian, resiliensi masih membutuhkan banyak upaya dalam menghasilkan metodologi komprehensif untuk memodelkan, mengukur, dan memahami resiliensi masyarakat yang kemudian dapat mendukung masyarakat dalam mengusulkan tambahan kegiatan dan pendekatan baru sehingga dapat memastikan bahwa masyarakat lebih siap, lebih fleksibel, dan memiliki kemampuan untuk segera pulih dan bangkit kembali dari suatu bencana apapun bentuknya (Cutter et al., 2008; Nguyen, 2020). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terkait resiliensi dan dukungan KTH terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat resiliensi KTH Putra Manglayang terhadap pengelolaan hutan berbasis masyarakat?
2. Bagaimana korelasi resiliensi terhadap dukungan KTH Putra Manglayang pada pengelolaan hutan berbasis Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi tingkat resiliensi KTH Putra Manglayang dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
2. Mengidentifikasi korelasi resiliensi KTH Putra Manglayang terhadap dukungan pada pengelolaan hutan berbasis Masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Memberikan gambaran terkait resiliensi dan dukungan pengelolaan hutan pada KTH Putra Manglayang
2. Memberi masukan dan kontribusi kepada *stakeholder* terkait pengelolaan dengan integrasi masyarakat.